



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
**UNIT KERJA** : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RAHMATIAH
2. Jabatan : KEPALA SUB BIDANG BINA DIKLAT KEPERAWATAN
3. NHK : 739861

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **871.450.000**

1. Tanah Seluas 831 m2 di KAB / KOTA MAJENE, HASIL SENDIRI  
Rp. 98.600.000
2. Tanah Seluas 1.497 m2 di KAB / KOTA MAJENE, WARISAN Rp.  
133.100.000
3. Tanah Seluas 1.532 m2 di KAB / KOTA MAJENE, WARISAN Rp.  
158.150.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 438 m2/190 m2 di KAB / KOTA  
MAJENE, WARISAN Rp. 136.650.000
5. Tanah Seluas 138 m2 di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI  
Rp. 28.400.000
6. Tanah Seluas 235 m2 di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI  
Rp. 48.400.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/45 m2 di KAB / KOTA  
MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 268.150.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **49.650.000**

1. MOTOR, YAMAHA SOUL METIC Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.  
3.400.000
2. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z W Tahun 2011, HASIL SENDIRI  
Rp. 1.400.000



3. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ M/T 1.5 LUXURY Tahun 2013,  
HADIAH Rp. 44.850.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	89.413.744
F. HARTA LAINNYA	Rp.	75.000.000
Sub Total	Rp.	1.085.513.744
III. HUTANG	Rp.	397.648.772
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	687.864.972

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.